

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TREND PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Anjar Nora Vurry¹, I Wayan Suwendra², Fridayana Yudiaatmaja³

¹²³Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
e-mail: noravury@ymail.com, ycgeda@yahoo.co.id, fyudiaatmaja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013 ditinjau dari rasio kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan trendnya pada tahun 2014-2016. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rasio kemandirian keuangan termasuk dalam kategori rendah sekali (2) rasio efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif, (3) rasio efisiensi PAD termasuk dalam kategori sangat efisien, (4) rasio IKR termasuk dalam kategori sangat kurang dan (5) *trend* kemandirian keuangan, efektivitas, IKR menunjukkan arah perkembangan yang positif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016, dan *trend* efisiensi menunjukkan arah perkembangan negatif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016.

Kata Kunci : efektivitas, efisiensi, indeks kemampuan rutin (IKR), dan kemandirian keuangan

Abstract

This research aims to know the development of financial capacity of local government district of Buleleng year of 2004-2013 in terms of financial independence ratio, effectiveness, efficiency, capability index routine (IKR) and the trend of year 2011-2016. The research design used descriptive qualitative research. Data was collected using documentation. The results showed that (1) the category of financial independence ratio is very low, (2) the category of effectiveness of PAD ratio is very effective, (3) the category of efficiency of PAD ratio is very efficient, (4) the category of IKR ratio is very low and (5) the trend of financial independence, effectiveness, IKR showed positive movement as well as forecast in the year 2014-2016, and the trend of efficiency showed a negative movement as well as the forecast in the year 2014-2016.

Keywords : effectiveness, efficiency, capability index routine (IKR), and *financial independence*

1. Pendahuluan

Di era reformasi diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya untuk menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana di dalam mengukur kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan analisis rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio kemandirian, analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio indeks kemampuan rutin dan analisis *trend*. Tujuan dilakukannya analisis rasio keuangan tersebut antara lain rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233), analisis rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004), analisis rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim 2004), rasio indeks kemampuan rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan analisis *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan (Amin, 2000)

Kabupaten Buleleng sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bali bagian utara, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya telah menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng ditemukan bahwa kontribusi PAD mengalami fluktuasi dan peranan bantuan pemerintahan pusat masih sangat tinggi. Selain itu dalam menilai kinerja keuangannya pemerintah daerah Kabupaten Buleleng hanya mengukur dari tingkat pencapaian yang maksimal dari target yang telah ditentukan dan belum menerapkan analisis tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, IKR dan *trend*.

Sehingga dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kemampuan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi keuangan pada pemerintah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, IKR, dan *trend*nya di tahun 2014-2016

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan sumbangan pemikiran bagi semua pihak terkait tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Secara teoritik penelitian ini dilandasi beberapa teori tentang otonomi daerah, keuangan daerah, APBD, dan kemampuan keuangan daerah.

Kata otonomi tersebut berasal dari kata Yunani yaitu *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum atau aturan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal tersebut diungkapkan dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002: 25) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi dari dua pengertian otonomi daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan perundang-undangan.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesa, 1995).

Menurut Abdul Halim (2007:19) definisi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian keuangan daerah sebagai berikut :

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang didapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan juga segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang itu belum di kuasai oleh pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Mamesah dalam Halim (2007:20), mendefinisikan APBD sebagai:

Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember."

Jadi dari pendapat-pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bentuk APBD terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah: (1) Pendapatan, yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pinjaman, ekuitas dana dan cadangan, aset, dan sisa anggaran, (2) Belanja, yang digolongkan menjadi 3, yaitu: belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, (3) Pembiayaan, yang dikelompokkan menjadi : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.

Kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka perlu dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Secara sederhana rasio kemandirian dapat dirumuskan dengan (Halim, 2004 : 150)

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \quad (1)$$

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Hersey dan Blanchard dalam Halim (2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: (1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, (3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Secara sederhana rasio efektivitas ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2004 : 150).

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \quad (2)$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Secara sederhana rasio efisiensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2004 : 150).

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \quad (3)$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

4. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Secara sederhana rasio efisiensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2007 : 234).

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \quad (4)$$

Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

5. Analisis *Trend*

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode *trend* analisis. Dimana menurut S. Munawir (2007:17) menjelaskan "*Trend* atau tendesi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui

tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun”.

Analisis *trend* digunakan untuk melihat perkembangan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang diukur dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio IKR. Penelitian ini menggunakan analisis *trend* dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square*). Analisis *trend* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y' = a + b X \quad (5)$$

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Bagian Keuangan Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Objek dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2013.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 10 tahun yaitu tahun 2004-2013. Data dikumpulkan dengan pencatatan dokumen, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan trendnya

No	Elemen Kemampuan	Rata-rata		
		Rasio	Kategori	Trend
1	Kemandirian	10,96%	Rendah Sekali	Naik
2	Efektivitas	108,28%	Sangat Efektif	Naik
3	Efisiensi	21,15%	Sangat Efisiensi	Turun
4	IKR	10,05%	Sangat Kurang	Naik
	Rata-rata total	37.61%	Cukup	Naik

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara rata-rata rasio kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Buleleng termasuk dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Dari hasil rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Buleleng pada tabel 1 dapat dilihat kemampuan daerah Kabupaten Buleleng didalam menjalankan tugasnya sudah sangat efektif. Selanjutnya rata-rata rasio efisiensi termasuk dalam kategori sangat efisien. Hasil rata-rata untuk rasio IKR keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013 termasuk dalam kategori sangat kurang. *Trend* untuk rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng arah perkembangannya dari tahun 2004-2013, dan peramalannya pada tahun 2014-2016 cenderung naik. *Trend* untuk rasio efektivitas PAD Kabupaten Buleleng arah perkembangannya dari tahun 2004-2013, dan peramalannya pada tahun 2014-2016 juga cenderung naik. *Trend* untuk rasio efisiensi PAD Kabupaten Buleleng arah perkembangannya dari tahun 2004-2013, dan peramalannya pada tahun 2014-2016 cenderung menurun. *Trend* untuk rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Buleleng arah perkembangannya dari tahun 2004-2013, dan peramalannya tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2014-2016 cenderung naik.

Secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng termasuk dalam kategori cukup dengan trend yang cenderung naik.

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hasil penelitian ini tidak

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Halim (2002) bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan dari penelitian Oesi Agustina. A (2013), Irsutami (2012), dan Suprpto (2006) dengan hasil penelitian rasio kemandirian termasuk dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Buleleng perlu melakukan suatu usaha yang lebih bijak lagi untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern, usaha tersebut dapat berupa pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat di dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas PAD yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dikategorikan sangat efektif. Hasil ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Menurut Sumadji P, dkk (2006 : 277), efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Oesi Agustina. A (2013) dengan hasil penelitian rasio efektivitas termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan efektivitas yang baik karena pemerintah daerah cukup berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatannya yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi PAD yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dikategorikan sangat efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Adisasmita R. (2006), efisiensi adalah input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina. A (2013) dan Suprpto (2006) dengan hasil penelitian rasio efisiensi termasuk dalam kategori sangat efisiensi. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng yang baik dimana dalam memungut PAD pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang relatif sedikit namun hasil yang didapatkan optimal.

Berdasarkan hasil analisis rasio indeks kemampuan rutin yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dikategorikan sangat kurang. Hal ini artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Radianto (1997 : 47), pengukuran derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah tanpa transfer. Ini disebabkan karena PAD Kabupaten Buleleng sangat kecil dan sampai sekarang ketergantungan pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat dominan.

Analisis *Trend* untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Buleleng arah perkembangannya dari tahun 2004-2013 cenderung naik begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dimana semakin lama Kabupaten Buleleng semakin menunjukkan tingkat kemandirian, efisiensi, dan indeks kemampuan rutin yang semakin bertambah. Arah *trend* yang positif ini perlu terus ditingkatkan agar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng mampu mandiri dalam membiayai pemerintahannya sendiri tanpa bergantung lagi dengan bantuan pemerintahan pusat dan semakin berhasil dalam merealisasikan target penerimaan pendapatannya yang berupa pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah ditetapkan serta PAD Kabupaten Buleleng akan mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Sebaliknya analisis *trend* untuk rasio efesiensi PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun dari tahun 2004-2013 begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016. Hasil ini menunjukkan adanya perkembangan yang negatif dari tahun ke tahun. Jika perkembangannya terus menurun, ada kemungkinan Rasio Efesiensi bisa mengalami kemunduran di tahun yang akan datang.

4. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng berada pada kategori cukup dengan perkembangan trend cenderung naik ke arah positif, akan tetapi jika dilihat dari Rasio Kemandirian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, (2) kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng jika dilihat dari Rasio Efektivitas termasuk dalam kategori sangat efektif, (3) kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng jika dilihat dari Rasio Efesiensi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori sangat efisien, (4) kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng jika dilihat dari Rasio Indeks Kemampuan Rutin termasuk dalam kategori sangat kurang, (5) analisis *Trend* untuk rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan indeks kemampuan rutin Kabupaten Buleleng dari tahun 2004-2013 menunjukkan arah perkembangannya yang positif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016 yang terus meningkat dan analisis *Trend* untuk rasio efesiensi PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun ke arah negatif dari tahun 2004-2013 begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016 terus menurun.

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan kepada: Pemerintah Kabupaten Buleleng harus meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya terutama dalam pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada di Kabupaten Buleleng. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng yang bisa lebih dioptimalkan, (2) pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah dan pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian kepada aparatur daerah untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pemungutan pajak dan retribusi, (3) Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng juga harus berupaya untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan dibanding dengan anggaran yang bersifat operasional pegawai. Dengan meningkatkan dana pada sektor pembangunan maka akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan asli daerah dan investasi daerah.

Daftar Pustaka

Adisasmitha, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Halim, Abdul. 2001. *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Edisi. Kedua, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

.....,2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN.

.....,2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Irsutami. 2012. *Analisis tingkat kemandirian keuangan Pemerintah daerah kota batam Untuk tahun 2006 – 2010*. Skripsi, Politeknik Negeri Batam.

- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oesi Agustina, A. 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang.
- Radianto, Elia. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku*. Jakarta : Prisma, No.3 Tahun XXVI, LP3ES.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Mamesa, 1995)
-, *Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- S, Munawi. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Sumadji P, dkk. 2006 *Kamus Ekonomi Lengkap*. Jakarta: Wipress.
- Suprpto (2006). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2000. *Auditing Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka.